

Dampak Tata Pemerintahan yang Baik terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman

Nurhatika^{1*}, Deviani²

^{1,2}. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: nurhatika136@gmail.com

Tanggal Masuk:
5 Agustus 2023
Tanggal Revisi:
14 Oktober 2023
Tanggal Diterima:
26 Oktober 2023

Keywords: Good Governance; Citizen Trust.

How to cite (APA 6th style)
Nurhatika & Deviani (2023). Dampak Tata Pemerintahan yang Baik terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (4), 1528-1543.

DOI:
<https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.1082>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This research aims to find out how much impact good governance has on the trust of the people of Pasaman district. This research uses legitimacy theory. The population of this study was the people of Pasaman district and data collection was carried out using a questionnaire which was distributed directly to 400 people of Pasaman district who were at least 17 years old, had a minimum of high school education, and people who had had dealings with the government. The research results show that 77.4% of good governance variables can influence public trust variables while the rest are influenced by other variables.

PENDAHULUAN

Kepercayaan adalah jenis keyakinan yang diberikan oleh masyarakat daerah kepada pemerintah. Darmmesta (2005) menjelaskan kepercayaan sebagai bentuk dimana seseorang bersedia dalam menyerahkan dirinya terhadap satu sisi yang ikut serta dalam melakukan pertukaran sebab dia memiliki kepercayaan terhadap bagian tersebut. Dwiyanto (2011) menjelaskan kepercayaan adalah kondisi dimana masyarakat mau menyerahkan nasibnya kepada para pejabat publik dan pemerintah karena mereka menganggap bahwa pemerintah akan selalu mengurus kepentingan masyarakatnya dengan baik. Menurut Mayer et al. (1995) kepercayaan publik adalah kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan, pejabat, dan instansi pemerintah.

Kepercayaan publik merupakan harapan positif dari masyarakat kepada pemerintah yang mempunyai kompetensi, kejujuran, ketaatan, serta *consistency* terhadap harapan publik (Nyan, 2000), yang dimaksud dengan "*integrity*" adalah pemerintahan yang bersikap jujur dalam bekerja dan selalu melakukan pekerjaan dengan baik. Kompetensi adalah keterampilan dan pengetahuan seseorang baik secara teknis maupun interpersonal yang dapat mendukung pada suatu keahlian seseorang. Konsistensi diartikan sebagai kesesuaian antara ucapan seseorang dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Konsistensi berkaitan dengan keandalan, kemampuan dalam memprediksi, dan melakukan pertimbangan. Loyalitas merupakan suatu keinginan untuk menyelamatkan atau melindungi seseorang secara fisik dan

emosional. Loyalitas berarti suatu komitmen atau tanggung jawab disaat memberikan layanan kepada publik.

Menurut Dwiyanto (2011) kepercayaan masyarakat adalah hal yang harus dikelola yang bersifat sangat dinamis dan bukanlah merupakan suatu hal yang datang dengan sendirinya. Menurut Park & Blenkinsopp (2011) kepercayaan masyarakat akan muncul disaat pelayanan yang diterima dari pemerintah menggambarkan layanan yang benar, bisa diandalkan, dan jujur, yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat.

Menurut Dwiyanto (2011) krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah antara lain disebabkan oleh berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kim (2010) menjelaskan suatu hal yang mendasari publik tidak percaya kepada pemerintah dapat ditimbulkan dari bermacam hal, termasuk kecenderungan masyarakat bahwa pembuat aturan, pemerintah sering menyelewengkan jabatan demi keuntungan mereka sendiri, publik pada umumnya tidak terkait dengan pemerintahan, pelayanan yang dirasakan masyarakat kurang baik, organisasi tidak bekerja dengan baik, melemahnya perdagangan nasional disebabkan karena faktor globalisasi, informasi yang berkembang, krisis atau skandal politik, pemerintahan yang tidak kompeten dll.

Terlepas dari pentingnya suatu kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan dan organisasi politik telah berkurang pada beberapa tahun terakhir ini baik pada negara berkembang maupun maju (Cheema & Popovski, 2010). Menurunnya tingkat kepercayaan publik dan dampaknya yang berbahaya bagi pemerintah dan masyarakat telah menjadi perhatian utama para politisi, jurnalis, dan warga negara (Bo, 2001). Karena tidak adanya kepercayaan politik, masyarakat menjadi tidak puas dengan sistem atau tatanan yang berlaku, yang dapat membawa ketidakpuasan dan penarikan diri dari proses politik, meninggalkan keadaan rapuh yang mungkin tidak mampu untuk pembangunan nasional (Diamond, 2007).

Kepercayaan publik bisa ditingkatkan dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana merupakan harapan dari setiap masyarakat di dalam pemerintahan. Berkualitasnya suatu pemerintahan bisa menciptakan suatu kehidupan negara yang teratur, dan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda mengenai sebuah pemerintahan. Kehidupan masyarakat yang makmur dapat menjadi suatu penilaian sistem pemerintahan apakah telah dijalankan dengan baik atau belum.

Buruknya citra pemerintahan ditandai dengan adanya tindakan korupsi dan nepotisme. Korupsi merupakan tindakan yang tidak baik yang melanggar kebenaran (Dion, 2010). Perbuatan korupsi biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan untuk keuntungan pribadi atas kekayaan atau status demi kepentingan keluarga, teman, kelompok etnis atau agama.

Taghavi *et al* (2011) mengamati bahwa korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi adalah fenomena umum yang berlaku dalam sistem administrasi dan politik di banyak negara. Khan dkk, (2012) menyarankan bahwa negara harus mengembangkan sistem untuk memastikan kredibilitas dengan menghukum pejabat korup yang terlihat jelas. Sedangkan nepotisme mengacu pada pemberian bantuan yang tidak semestinya kepada seseorang yang dekat dengan pejabat pemerintah, seperti anggota keluarga, anggota partai politik, anggota suku atau anggota yang sama, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan.

Fenomena yang terjadi di kabupaten pasaman yaitu di nagari languang rao utara dimana mantan wali nagari languang rao utara tersebut sudah menyelewengkan dana desa tahun 2018-2019. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan tim kejar pasaman, bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangannya atau sengaja menggunakan dana desa

untuk kepentingan pribadi, dimana ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 459.000.000.

Penahanan terhadap mantan wali nagari languang tersebut merupakan hasil dari penyidikan kasus korupsi penyalahgunaan dana desa pada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2018-2019 lalu di nagari itu, dimana ada pekerjaan yang tidak dikerjakan namun dalam pelaporan dikerjakan, dan ada juga yang dikerjakan tidak sempurna namun sudah dinyatakan sempurna/selesai, tindakan ini bisa menyebabkan kemunduran kepercayaan publik terhadap pemerintahan (Novitri Selvia, 7 Oktober 2022).

Ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah bisa juga dilihat dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dimana proses pelayanan lambat dan memakan waktu lama, serta adanya ketidakpastian harga dan waktu yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemberi layanan, sehingga membuat masyarakat mencari jalan alternatif lain agar mendapatkan layanan dengan cara tertentu, seperti dengan menawarkan biaya tambahan untuk mereka.

Dalam melakukan pemberian layanan kepada masyarakat, selain permasalahan di atas, dimana terdapat pula cara penyelenggaraan pelayanan yang diterima oleh publik yang seringkali merendahkan derajatnya sebagai warga negara. Karena warga diposisikan sebagai klien yang memerlukan bantuan para pejabat, maka mereka wajib mematuhi arahan dan keinginan dari pejabatnya. Hal ini karena budaya pemerintahan yang muncul selama ini bukanlah budaya pelayanan melainkan budaya yang mengarah pada budaya kekuasaan.

Tuntutan warga akan komponen tata pemerintahan yang baik seperti pelayanan yang berkualitas, perlakuan yang adil terhadap individu, transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan langkah-langkah yang kuat untuk mengurangi korupsi (UNDP, 1997) yang pada dasarnya merupakan kebutuhan etis atau moral. Diterapkannya *good governance* dapat diyakini bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik akan semakin baik, berkurangnya korupsi, kepentingan masyarakat akan lebih diperhatikan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah, pemerintah harus menerapkan *good governance* sesuai dengan prinsip transparansi dimana akses informasi yang terbuka dari entitas pemerintah mencerminkan transparansi dan menciptakan anggapan bahwa pemerintah bertindak secara legal, sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas dikonseptualisasikan sebagai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya kepada publik (Shafritz., et al 2015). Aturan hukum mengacu pada kerangka hukum yang adil tanpa memihak. Daya tanggap atau ketanggapan yang dirasakan adalah keyakinan bahwa pejabat pemerintah mendengarkan dan peduli dengan apa yang warga katakan (Anderson, 2010) dan perspektif warga negara tentang tata pemerintahan yang baik adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari riset yang dilakukan oleh (Yousaf dkk, 2016) mengenai tata kelola yang baik terhadap kepercayaan masyarakat. Riset M. Yousaf dkk. 2016 ini menggunakan teori legitimasi Menurut Suchman (1995) legitimasi merupakan asumsi yang umum bahwa tindakan organisasi sudah sesuai dengan norma sosial, nilai, kepercayaan yang berlaku dilingkungan masyarakat. Dalam penelitian penulis ini pengukuran variabel kepercayaan (dependen) diukur dengan kepuasan dengan kualitas layanan (Gadot et al. 2005). Janji yang ditepati oleh politisi (Christensen et al. 2005; Salminen et al. 2009, 2010) dan, informasi dan pengetahuan yang diberikan tentang layanan (Connell et al. 2006). *Good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi (independen). Sampel dalam penelitian ini berbeda dengan riset M. Yousaf sebelumnya, dimana sampel penelitian ini adalah masyarakat kabupaten pasaman.

Penelitian ini menggunakan teori legitimasi (*legitimacy theory*) Menurut Deegan et al., (2002) teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi senantiasa berusaha agar kegiatannya sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Rankin et al.

(2017) teori legitimasi digunakan untuk memahami aksi, aktivitas, atau kegiatan pemerintah. Dalam teori ini, menjelaskan bahwa pemerintah merupakan bagian dari masyarakat dan pemerintah harus menerapkan kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi, masyarakat akan merasa keberadaan dan aktivitas pemerintahan tersebut terlegitimasi, dimana legitimasi tersebut dapat dikatakan sebagai pengakuan pemerintah oleh masyarakat. Pengakuan tersebut merupakan hal yang penting karena dengan begitu keberlangsungan pemerintahan akan terus berlanjut dan akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten Pasaman, karena di daerah ini diduga terdapat kasus korupsi penyelewengan dana yang dilakukan oleh mantan wali nagari Languang pada beberapa kegiatan pembangunan tahun 2018-2019. Adanya kasus korupsi tersebut disebabkan karena masyarakat yang tidak tau terkait informasi dan laporan tentang dana yang diterima dan dikeluarkan, sehingga ini dapat dijadikan peluang untuk melakukan kecurangan, dimana membuat laporan bahwa ada pekerjaan yang tidak dikerjakan namun dalam pelaporan dikerjakan, dan ada juga yang dikerjakan tidak sempurna namun sudah dinyatakan sempurna/selesai, tindakan ini dapat merugikan masyarakat, sehingga akan menjadi perhatian masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap pemerintah, karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah menggunakan dana hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut pengungkapan informasi dan laporan terkait dana pada pemerintah daerah, khususnya daerah kabupaten pasaman yaitu dinagari languang menjadi isu yang cukup urgen untuk diperbaiki, diharapkan dengan adanya tata pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi, dapat mengembalikan citra positif pemerintah sehingga dapat mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. berdasarkan penjelasan tersebut, membuat penulis tertarik ingin meneliti tentang “Dampak Tata Pemerintahan yang Baik terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Menurut Suchman (1995) legitimasi adalah asumsi umum bahwa tindakan organisasi sudah sesuai dengan norma sosial, nilai, kepercayaan yang berlaku dilingkungan masyarakat. Menurut teori legitimasi, organisasi terus berusaha untuk beroperasi sesuai dengan norma dan batasan masyarakat. Organisasi harus responsif karena norma dan batasan ini tidak tetap tetapi akan berubah seiring waktu. Legitimasi menciptakan suatu ‘kontrak sosial’ antara organisasi dengan mereka yang terdampak atas aktivitas operasi organisasi. Pihak organisasi diharapkan untuk mematuhi ‘kontrak’ tersebut, baik yang disebutkan secara langsung (tersurat) maupun yang tidak langsung (tersirat).

Menurut teori legitimasi Wilmshurst T. dan Frost G. (2000) sebuah organisasi harus secara konsisten menunjukkan bahwa ia telah beroperasi sesuai dengan kontrak sosial. Untuk mencapai hal tersebut, biasanya organisasi menggunakan pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan guna mengarahkan kembali perhatian publik terhadap isu negatif atas aktivitas organisasi. Peran *good governance* ini dianggap dapat memulihkan citra positif suatu organisasi di hadapan publik. Dalam konteks pemerintahan tata pemerintahan yang baik dianggap dapat menambah poin positif untuk menutupi keberadaan isu-isu negatif aktivitas-aktivitas pemerintah daerah yang dinilai kurang sesuai dengan pandangan masyarakat.

Teori legitimasi menempatkan penegasan dan pengakuan publik sebagai dorongan mendasar dalam melakukan pengungkapan *good governance*. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam konteks pemerintahan legitimasi adalah suatu keadaan dimana pemerintahan bertindak sesuai dengan batasan, nilai dan aturan yang berlaku didalam masyarakat. Menurut Mayer & Scoot (2009) legitimasi merupakan landasan kesesuaian organisasi dengan lingkungan budayanya. Teori legitimasi digunakan dalam membenaran mengapa pemerintah harus menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kepercayaan warga. Kontrak sosial menjadi landasan teori legitimasi, seperti dikemukakan oleh Ghazali dan Chairiri (2007), oleh sebab itu teori legitimasi dapat mendukung keberlangsungan hidup pemerintah dengan menitikberatkan pada aktivitas dan kinerja pemerintahan yang baik.

Kepercayaan

Kepercayaan adalah konsep kompleks yang sulit untuk mengidentifikasi definisi yang diterima umum tetapi perlu untuk membangun kepercayaan pada negara dan lembaganya untuk menetapkan legitimasi tindakan negara. Jika masyarakat mempercayai pemerintah, mereka cenderung akan mematuhi arahan dan peraturan secara sukarela (Ackerman, 2001; Caillier, 2010; Tsang., et al 2009). Konsep kepercayaan mencakup politisi dan pejabat publik. Faktor faktor yang jelas mempengaruhi kepercayaan adalah menepati janji, belajar dari kesalahan, komentar keluarga dan teman tentang layanan mereka, perilaku staf terhadap pelanggan, ketertarikan mereka pada pandangan orang, kualitas pemimpin dan kualitas kepemimpinan/manajemen (Salminen & Norbacka, 2009, 2010).

Kepercayaan adalah evaluasi subyektif berdasarkan persepsi warga. Ketika ada kepercayaan, ini tidak menegaskan bahwa “pemerintah berfungsi sebagaimana mestinya, sebaliknya kepercayaan berarti bahwa pemerintah berfungsi dengan cara yang disukai oleh warga negara (Bouckaert, 2003). Untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah,” pemerintah harus memerintah dengan lebih baik, lebih transparan, bertanggung jawab, dan daya tanggap, dengan keterlibatan yang lebih aktif dengan publik dan khususnya penghormatan yang lebih ketat terhadap hukum dan kepentingan publik” (Diamond, 2007).

Tata Pemerintahan yang Baik

Tata pemerintahan yang baik didefinisikan oleh Bank Dunia pada tahun 1992 sebagai sistem pemerintahan yang dapat diandalkan, menyediakan layanan publik yang efisien, dan menjaga akuntabilitas rakyat. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, 1997) mendefinisikan pemerintahan yang baik sebagai kemitraan yang menguntungkan masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) Good governance adalah sebagai aturan untuk menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil.

Menurut Budi dan Bappenas (2007) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik adalah suatu konsepsi tentang menjalankan pemerintahan, konsep dan prinsip yang memandu interaksi antara industri swasta, masyarakat, dan pemerintah juga merupakan bagian dari *good governance*. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Administrasi Negara (2000) mendefinisikan *good governance* sebagai terpeliharanya “sinergi” interaksi antara sektor swasta, industri, pemerintah, dan masyarakat yang saling menguntungkan. Sementara itu Ulum dan Sofiani (2016: 34) memaknai bahwa tata pemerintahan yang baik mencakup semua masalah sehari-hari - hukum, politik, sosial dan ekonomi. Riddell (2009) menjelaskan *good governance* sebagai suatu kemampuan pemerinatah dalam menciptakan proses manajemen publik yang bertanggung jawab serta efisien dan efektif, yang terbuka pada partisipasi warga sehingga bisa memperkuat sistem pemerintahan yang demokrasi. Menurut Elahi (2009) *good governance* dicirikan sebagai siklus dan konstruksi yang mengarahkan hubungan politik, ekonomi dan menyinggung pada prinsip, aturan hukum,

keterbukaan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, dari perspektif warga negara, memperbaiki struktur administrasi dan layanan publik adalah *good governance*.

Tujuan dan Manfaat Tata Pemerintahan yang Baik

Penerapan *good governance* dapat memberikan dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Dampak yang baik dalam melakukan *good governance* antara lain yaitu biaya pemerintahan berkurang, kinerja pemerintah meningkat, dan persepsi publik terhadap pemerintah meningkat (Amin, 2012: 39).

Hipotesis

Dampak Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Akuntabilitas adalah salah satu indikator tata pemerintahan yang baik seperti sebuah blok untuk menghasilkan tata kelola yang baik (Rahman, 2009; Ray, 1999). Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dapat menimbulkan kepercayaan publik. Akuntabilitas mengacu pada sejauh mana seseorang bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi atau publik atas tindakan mereka (Shafritz & Russell, 1997). Asas akuntabilitas berarti tanggung jawab pejabat kepada orang-orang yang memberinya wewenang dan kekuasaan untuk mengelola berbagai urusan dan kepentingan mereka. pemerintah bertanggung jawab atas semua kebijakan, tindakan, moral dan ketidakberpihakan sikapnya terhadap masyarakat.

Akuntabilitas dapat membangun kepercayaan ketika mereka yang berkuasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua kebijakan yang diterapkan. Pertanggungjawaban mereka yang berkuasa kepada mereka yang memberi kekuasaan diatur sedemikian rupa sehingga orang-orang mengetahui apa yang mereka lakukan sekaligus dapat memantau tindakan yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Mekanisme akuntabilitas pada dasarnya merupakan cara untuk mengontrol masyarakat dan sektor swasta dalam pemerintahan. Penelitian yang dilakukan Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat, dengan adanya akuntabilitas dalam praktek pemerintah masyarakat cenderung merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Dampak Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi mengacu pada kejelasan dan ketersediaan keputusan dan informasi bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap informasi tersebut. Transparansi dianggap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui keterbukaan dalam organisasi pemerintahan, masyarakat pada umumnya diberi kesempatan untuk mempelajari strategi-strategi yang akan diambil oleh otoritas publik. Transparansi berarti publik dapat dengan terbuka untuk mengetahui proses dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan keputusan apa yang diambil. Dalam tata pemerintahan yang baik, salah satu asasnya adalah transparansi, artinya semua keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan. Semakin transparan pemerintah dalam memberikan informasi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian Estrada L., & Bastida, F. (2020) menjelaskan bahwa transparansi yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Dampak Aturan Hukum terhadap Kepercayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga berpedoman pada sistem dan supremasi hukum yang kuat dan aman. Ketika penegakan hukum konsisten dan tidak diskriminatif, kepercayaan dapat dibangun. Di sisi lain, kepercayaan terhadap otoritas publik berkurang ketika hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat menindas. Sejumlah fakta hukum menunjukkan bahwa masyarakat tidak yakin bagaimana menangani kasus korupsi dengan lebih baik, baik di negara maju maupun dinegara berkembang, korupsi terbukti menjadi salah satu faktor politik paling signifikan yang menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.

Warren (2006) menyatakan bahwa munculnya peraturan atau hukum pencegahan, telah menciptakan munculnya tindakan korupsi itu sendiri, korupsi dan kepercayaan menunjukkan bahwa penduduk di seluruh dunia ini mewaspadai kurangnya integritas dan perilaku tidak etis pemerintah mereka. Dampak korupsi berpotensi dengan mudah menghancurkan pemerintahan yang efektif, merupakan tanggung jawab publik, swasta, dan pemerintah untuk membangun kepercayaan dengan menegakkan hukum, memerangi korupsi, dan memiliki pemerintahan yang efektif. Korupsi merusak kepercayaan sosial, efek negatif korupsi tidak dapat dipungkiri ketika muncul pada tata pemerintahan yang baik. Hasil penelitian dari Yousaf, M., et al. (2016) menjelaskan bahwa penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat sejalan dengan penelitian Connell., et al (2006) hipotesis penegakan hukum berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Aturan hukum berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Dampak Daya Tanggap terhadap Kepercayaan Masyarakat

Ketanggapan berarti bahwa lembaga dan proses pemerintah berusaha melayani semua pemangku kepentingan dalam kerangka waktu yang masuk akal (United Nation Department of Economic and Social Affairs, 2007). Daya tanggap adalah praktik yang diinginkan untuk mencapai pemerintahan yang baik sepenuhnya dari perspektif masyarakat. Pemerintah harus peka dan tanggap terhadap persoalan warga agar terkesan pemerintah sedang membangun kepercayaan. Untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus terus memberikan bantuan yang lebih banyak kepada warganya untuk menumbuhkan kepercayaan, harmoni, integritas, dan ketidakmampuan. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi pelayanan publik yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi lebih mementingkan apa yang menjadi kemauan atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Dalam praktik pemerintahan, ketika orang dan sektor swasta mempercayai pemerintah, kebanyakan masyarakat akan lebih dulu memberikan penghargaan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahnya. Pelayanan publik dalam perkembangannya tidak hanya pelayanan dasar, tetapi pelayanan yang lebih komprehensif yang memperhatikan perbedaan kepentingan pengguna hasil dan penerima manfaat layanan. Berdasarkan pengalaman empiris, diharapkan perluasan sasaran pelayanan akan mendorong kreativitas pemerintah yang tanggap dalam peningkatan kualitas pelayanan publik guna mencapai kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Hasil penelitian Caillier (2010) menjelaskan bahwa daya tanggap berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Daya tanggap berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Dampak Kesederhanaan Administrasi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Dalam administrasi, prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi serta meningkatkan legitimasi suatu sistem administrasi. Kepercayaan dapat berkurang, jika administrasi dirasakan terlalu jauh dan tidak

efektif. Good governance merupakan konsep nilai sarat, mendukung ideal tindakan administratif, dan menolak perilaku yang tidak etis atau di pertanyakan. Dalam kasus yang ideal, nilai dan prinsip bersama menentukan hubungan antara otoritas publik dan warga negara. Tata pemerintahan yang baik bergantung pada moralitas yang baik dari pelayanan publik. Meskipun kepercayaan dan administrasi yang baik adalah konsep yang berbeda, keduanya saling terkait dan tidak dapat dibandingkan secara langsung (Bouckaert dan Van de Walle, 2003). Hasil penelitian dari Yousaf, M., et al. (2016) menjelaskan bahwa kesederhanaan administrasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat

H5 : Kesederhanaan administrasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian yang tergolong kausal atau bersifat hubungan sebab akibat. Menurut Sugiyono (2019) jenis penelitian kausal ini merupakan penelitian hubungan sebab akibat, sehingga dapat diasumsikan bahwa tata pemerintahan yang baik berfungsi sebagai variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan kepercayaan berfungsi sebagai variabel dependen (yang dipengaruhi).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pasaman. Sampel untuk penelitian ini berjumlah 400 dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang terdiri dari masyarakat yang berusia minimal 17 tahun dan masyarakat yang berusia lebih dari 17 tahun, masyarakat yang tingkat pendidikannya minimal SMA yang dapat dengan mudah membaca dan memahami kuesioner, tanpa memandang jenis kelamin dan pekerjaan apa pun, dan masyarakat yang sudah pernah berurusan dengan pemerintahan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber. Informasi yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian disebut sebagai data primer. Didapatkan langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara. Melalui penggunaan daftar pernyataan yang berbentuk kuesioner digunakan untuk mengumpulkan informasi dari subjek penelitian. Pada penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner, survei digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Faktor yang diuji adalah variabel terikat dan variabel bebas.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2019). Uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Dengan menggunakan model regresi berganda, uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel dependen terhadap kelima variabel independen dalam penelitian ini. Temuan analisis regresi linier berganda penelitian ini disajikan di bawah ini.

$$Y = 6.468 + 0,402 + 0,311 + 0,308 + 0,668 + 0,086$$

Berdasarkan permaman regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta dari persamaan regresi linear adalah sebesar 6.468 yang berarti tanpa adanya variabel akuntabilitas (X1), transparansi (X2), aturan hukum (X3), daya tanggap (X4), dan kesederhanaan administrasi (X5), maka kepercayaan masyarakat (Y) sebesar 6.468. Hal ini dikarenakan masih adanya variabel lain diluar variabel akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat di kabupaten pasaman.
2. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,402 yang menunjukkan bahwa variabel lain dianggap konstan dan peningkatan variabel akuntabilitas akan menghasilkan peningkatan kepercayaan publik sebesar 0,402
3. Nilai koefisien regresi variabel transpransi (X2) adalah sebesar 0,311 yang berarti jika variabel transpransi meningkat maka akan menyebabkan kenaikan terhadap kepercayaan masyarakat sebesar 0,311 dan variabel lain dianggap tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel aturan hukum (X3) adalah sebesar 0,308 yang berarti jika variabel aturan hukum meningkat maka akan menyebabkan kenaikan terhadap kepercayaan masyarakat sebesar 0,308 dan variabel lain dianggap tetap.
5. Variabel daya tanggap (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,668 yang menunjukkan bahwa variabel lain dianggap konstan dan peningkatan variabel daya tanggap akan menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat sebesar 0,668.
6. Nilai koefisien regresi untuk variabel kemudahan administrasi (X5) sebesar 0,086. Hal ini menunjukkan bahwa selama variabel lain dianggap konstan, peningkatan variabel kemudahan administrasi akan menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat sebesar 0,086.

Uji Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel indenpenden mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel indenpenden. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,774 berarti variabel indenpenden dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 77,4%. Sedangkan sisanya sebesar 22,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel-variabel indenpenden yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 ^a	.777	.774	2.12516

a. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1
b. Dependent Variable: y

Sumber: *Data olahan SPSS, 2023*

Uji F

Uji f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel indenpenden (X) yang ada dalam model regresi ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel indenpenden memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil dari penelitian uji F.

Tabel 2
Uji F (Simultan)

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6186.960	5	1237.392	273.982	.000 ^b
	Residual	1779.430	394	4.516		
	Total	7966.390	399			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x5, x2, x4, x3, x1

Sumber: *Data olahan SPSS, 2023*

Berdasarkan hasil uji F (Anova) nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai alpha 5% (0,05) dan menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Diketahui nilai f_{hitung} sebesar 273,982 dan nilai f_{tabel} 2,236 sehingga nilai f_{hitung} (273,982) > f_{tabel} (2,236) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji t

Uji t merupakan pengujian secara parsial apakah terdapat pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi terhadap kepercayaan masyarakat Kabupaten Pasaman. Jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai (sig) < alpha 0,05 maka terdapat pengaruh. Sedangkan jika nilai signifikan (sig) > alpha 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. Berikut disajikan hasil penelitian uji t.

Tabel 3
Uji t (Parsial)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.798	1.214		5.601	.000
	x1	.556	.099	.228	5.604	.000
	x2	.460	.070	.216	6.540	.000
	x3	.233	.042	.223	5.486	.000
	x4	.560	.061	.321	9.227	.000
	x5	.079	.049	.051	1.627	.105

a. Dependent Variable: y

Sumber: *Data olahan SPSS, 2023*

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Pengaruh variabel akuntabilitas (X1) terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. untuk variabel akuntabilitas (X1) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t_{hitung} (5.604) > nilai t_{tabel} (1.966003). Maka dapat disimpulkan secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
2. Pengaruh variabel transparansi (X2) terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. untuk variabel transparansi (X2) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t_{hitung} (6.540) > nilai t_{tabel} (1.966003). Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
3. Pengaruh variabel aturan hukum (X3) terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel aturan hukum (X3) sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t_{hitung} (5.486) > nilai t_{tabel} (1.966003). Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

4. Pengaruh variabel daya tanggap (X4) terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel daya tanggap (X4) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} (9.227) > \text{nilai } t_{tabel} (1.966003)$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
5. Pengaruh variabel kesederhanaan administrasi (X5) terhadap kepercayaan masyarakat (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel kesederhanaan administrasi (X5) sebesar $0.105 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} (1.627) < \text{nilai } t_{tabel} (1.966003)$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak yang berarti variabel kesederhanaan administrasi tidak berpengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa hipotesis 1 untuk akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, diterima. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi pada tabel menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$. Hal ini berkaitan dengan penelitian Yousaf, M., *et al.* (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, dimana akuntabilitas memainkan perannya sendiri dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntabilitas mengacu pada sejauh mana seseorang bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi atau publik atas tindakan mereka (Shafritz & Russell, 1997). Akuntabilitas dapat membangun kepercayaan ketika mereka yang berkuasa dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua kebijakan yang diterapkan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Beshi, T.D., dan Kaur, R. (2020), yang temuannya juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas, dengan adanya akuntabilitas dalam praktek pemerintah masyarakat cenderung merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan yang dilakukannya.

Sesuai dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa organisasi dalam pemerintahan secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin hasil kerja mereka dan tanggung jawab berada dalam batas norma yang berlaku dimasyarakat. Ketika pemerintah mempraktikkan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, hal itu cenderung membuat warga negara merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kesan masyarakat ini selanjutnya berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu akuntabilitas dianggap sebagai faktor utama yang berpengaruh untuk menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis 2 untuk transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, diterima. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi pada tabel menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$. Hal ini berkaitan dengan penelitian Estrada, L., & Bastida, F. (2020) yang hasilnya menunjukkan semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hal ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahnaz Mansoor (2021) dimana transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi yang disebarkan oleh pemerintah dalam mencapai tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi terhadap pemerintah.

Praktik transparansi di pemerintah daerah sangat penting. Sebab, untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja pemerintah, serta mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang

akan terjadi, warga perlu memiliki informasi yang tegas. Terutama, seperti yang bisa dipahami, jika pemerintah tidak memperjelas apa yang sebenarnya dilakukannya, walaupun sebenarnya pemerintah tidak melakukan apa-apa kepada publik. Bagaimanapun, pandangan positif atau negatif warga negara terhadap pemerintah mereka secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima tentang pemerintah. Karena keprihatinan inilah para pemimpin demokrasi di seluruh dunia mengedepankan isu transparansi tidak hanya untuk mengakhiri kerahasiaan dalam pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Veal et al. 2011).

Menurut teori legitimasi, jika manajemen percaya bahwa inilah yang diharapkan masyarakat dari suatu organisasi, ia akan melaporkan aktivitas atau aktivitas operasionalnya. Keaslian dipandang penting bagi suatu organisasi, karena memang keaslian daerah setempat bagi suatu organisasi sangat mempengaruhi daya dukung organisasi tersebut.

Pengaruh Aturan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis 3 untuk aturan hukum berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, diterima. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi pada tabel menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$ Hal ini berkaitan dengan penelitian Yousaf, M., *et al.* (2016) menunjukkan bahwa hukum berpengaruh sangat signifikan terhadap kepercayaan masyarakat, dimana sejalan dengan penelitian Connel dan Mannion (2006) yang menemukan bahwa rule of law sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga berpedoman pada sistem dan supremasi hukum yang kuat dan aman. Ketika penegakan hukum konsisten dan tidak diskriminatif, kepercayaan dapat dibangun. Di sisi lain, kepercayaan terhadap otoritas publik berkurang ketika hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat menindas. Menurut persepsi atau asumsi teori legitimasi, tindakan entitas adalah tepat dan sejalan dengan norma dan nilai kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Daya Tanggap Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Daya tanggap merupakan kriteria penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah (Yang dan Pandey 2007). Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis 4 untuk daya tanggap berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat, diterima. Hipotesis ini diterima karena nilai signifikansi pada tabel menunjukkan nilai $0,000 < 0,05$. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yousaf et al. (2016) yang mana daya tanggap berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, hal ini berarti bahwa daya tanggap sangat penting dalam membangun kepercayaan publik.

Salah satu hal yang diharapkan masyarakat dari pemerintah yang mengaturnya adalah daya tanggap. Temuan penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa daya tanggap memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mengatur kredibilitas dan daya saingnya dan yang terpenting untuk menjaga kepercayaan publik, pemerintah harus berperan dalam mengelola tuntutan warga negaranya dengan baik.

Menurut teori legitimasi, suatu organisasi akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen percaya bahwa inilah yang diharapkan masyarakat, seperti ditunjukkan berikut ini: "Harapan sosial tidak dianggap tetap, tetapi berubah seiring waktu sehingga menuntut organisasi untuk tanggap ke mana mereka beroperasi."

Pengaruh Kesederhanaan Administrasi Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis 5 untuk kesederhanaan administrasi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Nilai signifikansi pada tabel

menunjukkan nilai $0,105 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa kesederhanaan administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Yousaf, M., *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa kemudahan administrasi dapat menghasilkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesederhanaan administrasi dengan kepercayaan masyarakat.

Dalam administrasi prinsip-prinsip tata tata pemerintahan yang baik harus diikuti untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap administrasi dan meningkatkan legitimasi sistem administrasi. Ketika pemerintah mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberikan layanan berkualitas tinggi kepada publik, memberikan informasi yang relevan tentang layanan tersebut, dll. Yang dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, didapatkan dampak tata pemerintahan yang baik terhadap kepercayaan masyarakat kabupaten Pasaman yaitu sebesar 77,4%. Dimana dari hasil uji yang dilakukan tata pemerintahan yang baik diuraikan menjadi 4 variabel yaitu akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi, secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kabupaten Pasaman. Berdasarkan pengujian parsial, variabel independen akuntabilitas (X1), transparansi (X2), aturan hukum (X3), dan daya tanggap (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat kabupaten Pasaman. Sedangkan variabel kesederhanaan administrasi (X5), tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat kabupaten Pasaman.

Dari hasil uji, didapatkan bahwa variabel daya tanggap memiliki pengaruh paling tinggi terhadap kepercayaan masyarakat sehingga salah satu hal yang diharapkan masyarakat dari pemerintah yang mengaturnya adalah daya tanggap, daya tanggap memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah diikuti dengan variabel lainnya yaitu akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan kesederhanaan administrasi.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Peneliti tidak melakukan wawancara dalam penelitian ini, sehingga kesimpulan penelitian hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan.
2. Koefisien determinan pada penelitian ini hanya mampu menerangkan 77,4% pengaruh variabel tata pemerintahan yang baik (akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi). sehingga kepercayaan masyarakat di kabupaten Pasaman dipengaruhi oleh variabel lain.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data berupa wawancara dengan masyarakat yang menjadi responden penelitian agar bisa mendapatkan data yang lebih nyata dan bisa keluar pertanyaan yang ada dikuesioner yang mungkin terlalu sempit atau kurang menggambarkan keadaan sesungguhnya.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel baru dalam meneliti kepercayaan selain akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi yang dapat menunjukkan pengaruh terhadap variabel kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. M., & Said, J. (2015). Public accountability system: Empirical assessment of public sector of Malaysia. *Said, J., Alam, MM, and Aziz, MA*, 225-236.
- Alessandro, M., Lagomarsino, B. C., Scartascini, C., Streb, J., & Torrealday, J. (2021). Transparency and trust in government. Evidence from a survey experiment. *World Development*, 138, 105223
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Armstrong, E. (2005). Integrity, transparency and accountability in public administration: Recent trends, regional and international developments and emerging issues. United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public trust in local government: Explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review*, 20, 337-350.
- Blind, P. K. (2007). Building Trust in Government in The Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues. In *7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government*.26-29. UNDESA Vienna.
- Bouckaert, G., & Van de Walle, S. (2003).Comparing Measures of Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators of ‘Good Governance’: Difficulties in Linking Trust and Satisfaction Indicators.*International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 329-343.
- Dharmmesta, B. S. (2005). Kontribusi Involvement dan Trust in a Brand Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan.*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 287-304.
- Cheema, G. S. (2010). Building trust in government: An introduction. In G. S. Cheema & P. Vesselin (Eds.), *Building trust in government: Innovations in governance reform in Asia*. New York: United Nations University Press.
- Estrada, L., & Bastida, F. (2020).Effective transparency and institutional trust in Honduran Municipal Governments.*Administration & Society*, 52(6), 890-926.
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50-73.
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., & Tobin, H. B. I. (2013). The effect of transparency on Trust in Government: A cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586. <https://doi.org/10.1111/puar.12047>.
- Hasthoro, H. A., & Sunardi, S. (2016). Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(1), 53-68
- Kathi, P. C., & Cooper, T. L. (2005). Democratizing The Administrative State: Connecting Neighborhood Councils and City Agencies. *Public Administration Review*, 65(5), 559-567.
- Kim, P. S. (2010). Building Trust by Improving Governance: Searching for a Feasible Way for Developing Countries. *Public Administration Quarterly*, 34(3), 271-299
- Mansoor, M. (2021). Citizens' trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government information quarterly*, 38(4), 101597.

- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.
- Mishra, S. S., & Momin, M. M. (2020). Is citizens' trust escalating the effect of sound governance on citizens' satisfaction in Ethiopia?. *International Journal of Public Administration*, 43(1), 84-93.
- Moon, M. J. (2003). Can IT Help Government to Restore Public Trust? Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector. In *36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the* (pp. 8-pp). IEEE.
- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19-29.
- Nyhan, Ronald C. (2000). Changing the Paradigm: Trust and Its Role in Public Sector Organizations. *American Review of Public Administration*, 30(1), 87-109.
- OECD, O. (2013). Trust in government, policy effectiveness and the governance agenda. *Government at a Glance, 2013*.
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The Roles of Transparency and Trust in the Relationship between Corruption and Citizen Satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254-274.
- Porumbescu, G. A. (2015). Using transparency to enhance responsiveness and trust in local government: can it work?. *State and Local Government Review*, 47(3), 205-213.
- Rahaman, M. M. (2009). Parliament and good governance: A Bangladesh perspective. *Japanes Journal of Political Science*, 9, 39-62.
- Ray, B. (1999). Good governance, administrative reform and socio-economic realities: A South Pacific perspective. *International Journal of Social Economics*, 26, 354-369.
- Salminen, A., & Ikola-Norrbacka, R. (2010). Trust, good governance and unethical actions in Finnish public administration. *International journal of public sector management*, 23(7), 647-668.
- Taufiqi, D., & Ariani, K. R. (2022). The Effect Of Good Governance, Accountability, And Transparency Of Village Funds On Public Trust. *Procedia Of Social Sciences And Humanities*, 3, 184-191.
- Uar, A. (2016). Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pelayanan publik pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 1-11.
- Ulisah, S. (2016). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat. *Gema Keadilan*, 3(1), 86-95.
- Veal, Don-Terry; William I. Sauser, Jr. and Maria T. Folmar (2011) Promoting transparency in local governments. In Cal, Clark and Don-Terry, Veal (eds), *Advancing excellence and public trust in government*, Rowman and Littlefield Publishers Inc.: New York.
- Vigoda-Gadot, E., & Yuval, F. (2003). Managerial quality, administrative performance and trust in governance revisited: A follow-up study of causality. *International Journal of Public Sector Management*, 16(7), 502-522
- Walle, S. V., & Six, F. (2014). Trust and Distrust as Distinct Concepts: Why Studying Distrust in Institutions is Important. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(2), 158-174
- Warah, M. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Skripsi, Universitas Islam negeri Ar-Rainry Darussalam Banda Aceh*.

- Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2017).Gaya Kepemimpinan dan Good Governance Sebagai Upaya Peningkatan Excellent Service Dan Kepercayaan Masyarakat (Studi Kasus Dinperindag Jawa Tengah).*Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(2), 270-284.
- World Bank*.(1992). *Governance and Development*.*World Bank*.
- Yang, K., & Pandey, Sanjay K. (2007). Public responsiveness of government organizations: Testing a preliminary model. *Public Performance and Management Review*.
<https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576310204>.
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016).Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan.*Government Information Quarterly*, 33(1), 200-209.